

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

YULIANA PRADEWI YANTI ROHOS

12190460

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliana Pradewi Yanti Rohos
NIM : 12190460
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017-2021”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Yang menyatakan



(Yuliana Pradewi Yanti Rohos)

NIM.12190460

HALAMAN PENGAJUAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Yuliana Pradewi Yanti Rohos

12190460

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017-2021"**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

YULIANA PRADEWI YANTI ROHOS

12190460

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 24 Mei 2023

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.
(Ketua Tim)
2. Dra, Putriana Kristanti, M.M., Akt., CA.
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si.
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 07 Juni 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA. CMA.,CPA.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017-2021

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya

Yogyakarta, 03 Mei 2023



Yuliana Pradewi Yanti Rohos

12190460

DUTA WACANA

HALAMAN MOTTO

“Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia
Yang Memberi Kekuatan kepadaku” (**Filipi 4 ayat 13**)

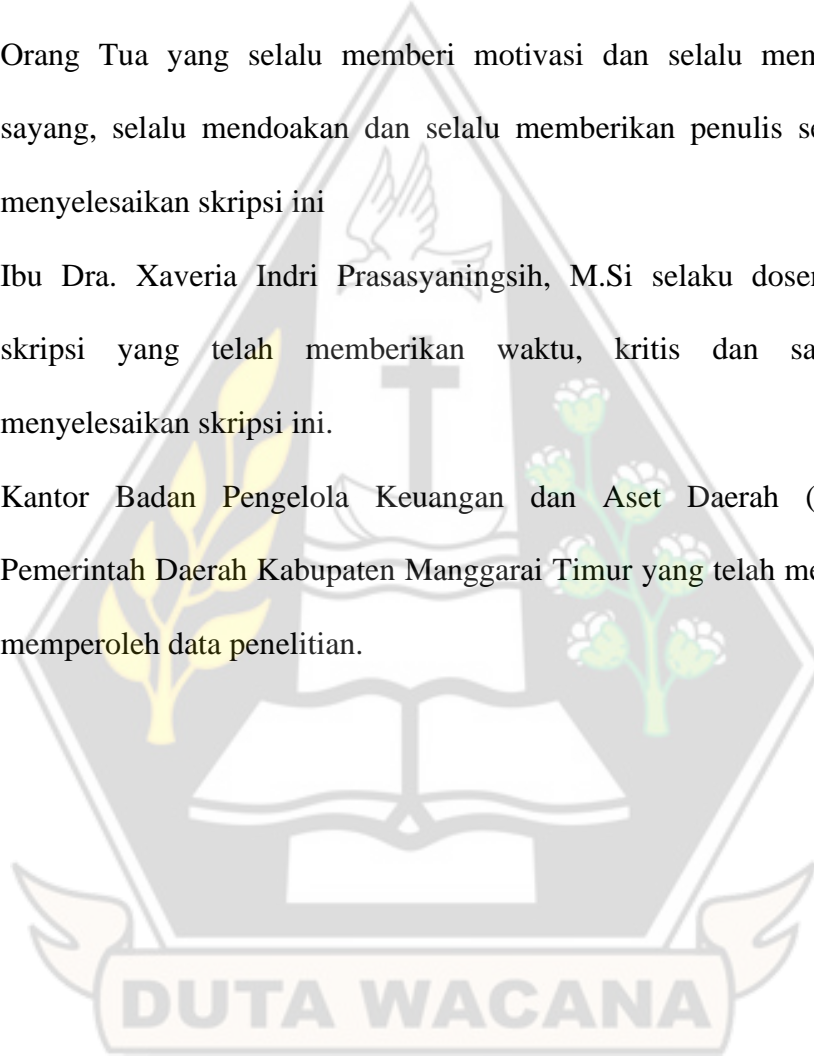
“Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah
kasihmu dalam hal saling membantu” (**Efesus 4 ayat 2**)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh berkat dan rahmatnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Orang Tua yang selalu memberi motivasi dan selalu memberikan kasih sayang, selalu mendoakan dan selalu memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, kritis dan saran sehingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Perminas, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
2. Ibu Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Akt., CA. CMA., CPA selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran telah memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan sejak awal hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen, karyawan, dan staff Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana atas arahan bimbingan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis
5. Kedua orang tua, Bapak Longginus Rohos dan Ibu Maria darfina yang selalu memberikan semangat, doa kasih sayang, serta dukungan kepada penulis
6. Kepada adik tercinta Elin Rohos dan Nasya Rohos yang selalu memberi dukungan kepada penulis

7. Kepada seluruh keluarga besar tercinta yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Manggarai Timur yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Kepada Seluruh teman-teman tercinta, Tika, Olick, Njelic, Wisuk, Ntut, Sharon dan Rista yang selalu memberikan bantuan maupun semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 03 Mei 2023



Yuliana Pradewi Yanti Rohos

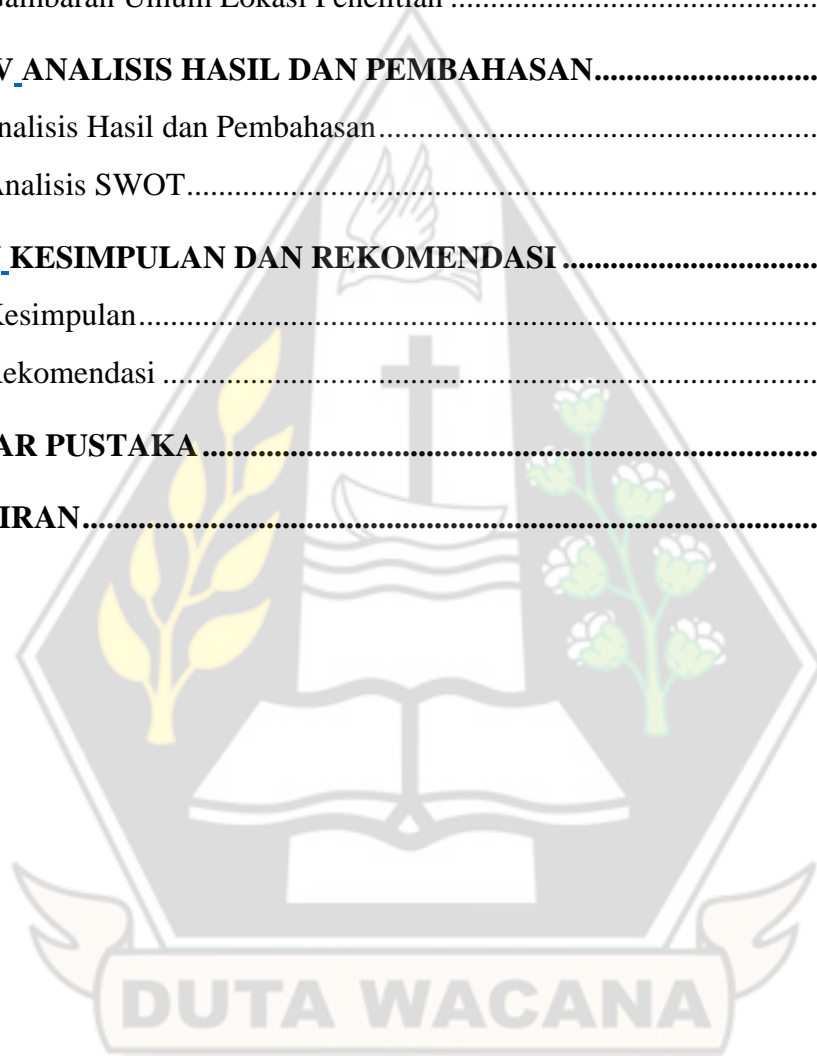


DUTA WACANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kontribusi Penelitian.....	4
1.5 Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Keagenan	7
2.2 Otonomi Daerah	8
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	9
2.4 Laporan Realisasi Anggaran/ LRA	12
2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.6 Rasio Keuangan.....	14

2.7 Penelitian Terdahulu.....	17
2.8 Analisis SWOT.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data	21
3.2 Langkah-Langkah Penelitian.....	25
3.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Analisis Hasil dan Pembahasan.....	29
4.2 Analisis SWOT.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi	22
Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Kriteria Kemandirian Daerah	22
Tabel 3.3. Kriteria Rasio Efektivitas PAD	23
Table 3.4. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	23
Tabel 3.5. Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	24
Tabel 3.6. Kriteria Rasio Pertumbuhan	25
Tabel 3.7. Data Konsolidasi Bersih (DKB)	27
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi	29
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pada	31
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan	33
Tabel 4.5 Perhitungan rasio Ketergantungan keuangan daerah	34
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD	35
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	36
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	36
Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	36
Tabel 4.10 Perhitungan Rasio Belanja Modal	39
Tabel 4.11 Perhitungan Rasio Belanja Operasi	39
Tabel 4.12 Pendapatan Daerah	41
Tabel 4.13 Persentase Pendapatan Daerah	41
Tabel 4.14 Gambaran Analisis SWOT	43

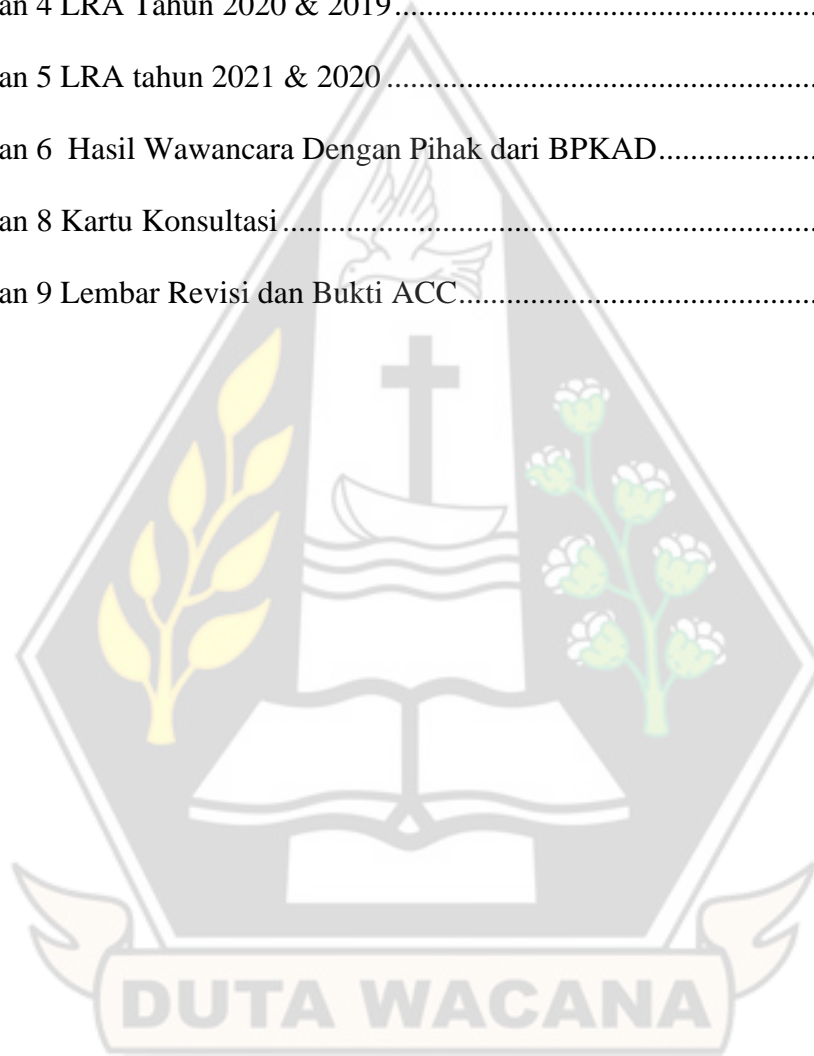
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 LRA Tahun 2017 & 2016.....	54
Lampiran 2 LRA Tahun 2018 & 2017.....	55
Lampiran 3 LRA Tahun 2019 & 2018.....	56
Lampiran 4 LRA Tahun 2020 & 2019.....	57
Lampiran 5 LRA tahun 2021 & 2020.....	59
Lampiran 6 Hasil Wawancara Dengan Pihak dari BPKAD.....	61
Lampiran 8 Kartu Konsultasi.....	66
Lampiran 9 Lembar Revisi dan Bukti ACC.....	68



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

Yuliana Pradewi Yanti Rohos

12190460

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

yulianapradewi08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk tahun anggaran 2017-2021. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2016-2021 yang diperoleh dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manggarai Timur. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan rasio keuangan diantaranya rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Hasil penelitian menunjukkan PAD yang diperoleh Daerah sangat rendah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur masih sangat bergantung pada dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi). Hal ini menyebabkan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian yang tergolong sangat rendah dan rasio ketergantungan yang tergolong sangat tinggi. Rasio efektivitas secara umum tergolong kurang efektif, rasio efisiensi secara umum tergolong efisien, untuk rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, dan belanja daerah secara umum mengalami pertumbuhan yang tergolong rendah, dan untuk rasio keserasian menunjukkan pengeluaran belanja paling besar adalah belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Pemerinta Daerah, Rasio Keuangan

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE REGIONAL
GOVERNMENT OF EAST MANGGARAI REGENCY
BUDGET YEAR 2017-2021**

Yuliana Pradewi Yanti Rohos

12190460

Faculty Of Business Accounting Study Program

Duta Wacana Christian University

yulianapradewi08@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Regional Government of East Manggarai Regency for the 2017-2021 fiscal year. This type of research is descriptive quantitative using secondary data in the form of the East Manggarai Regency Budget Realization Report (LRA) for the 2016-2021 fiscal year obtained from the East Manggarai Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) office. The data analysis technique in this study is to use financial ratios including the ratio of the degree of decentralization, the ratio of independence, the ratio of dependency, the ratio of effectiveness, efficiency ratio, growth ratio and compatibility ratio. The results showed that the PAD obtained by the regions was very low, causing the regional government of East Manggarai Regency to still depend heavily on funds from external parties (central and provincial governments). This causes the ratio of degrees of decentralization, the ratio of independence which is classified as very low and the ratio of dependency which is classified as very high. Effectiveness ratios are generally classified as less effective, efficiency ratios are generally classified as efficient, for the ratio of growth of PAD, income, and area spending in general, growth is relatively low, and for the compatibility ratio, the largest expenditure is operational expenditure compared to capital expenditure.

Keywords: Financial Performance, Regional Government, Financial Ratios

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan pemberian kebijakan otonomi secara luas kepada seluruh Kabupaten atau Kota di Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus secara mandiri segala urusan dan kepentingan masyarakat berdasarkan pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi yang ada sebagai pendapatan daerah. Daerah juga secara mandiri dapat melaksanakan berbagai kegiatan dengan menggunakan anggaran sendiri tanpa menggantungkan dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Menurut Mardiasmo (2018) otonomi daerah juga memuat tujuan agar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik, kesejahteraan masyarakat yang meningkat, demokrasi yang tumbuh, serta adanya pemerataan dan keadilan ditengah masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak terlepas penggunaan anggaran dalam membiayai program serta kegiatan daerah. Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perlakuan terhadap keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel, dan selaras berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Menurut Halim (2014) yang dapat dilakukan dalam implementasi otonomi daerah yaitu dengan mengetahui kesanggupan daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya dalam pengelolaan bidang keuangan. Daerah harus dengan baik dapat menggali serta mengelola keuangan yang digunakan dalam membiayai segala penyelenggaraan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 perihal pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa segala penerimaan dan pengeluaran daerah dalam mewujudkan desentralisasi termuat di dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Maksud dari APBD sendiri adalah suatu rencana anggaran dari pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang termuat di dalam peraturan daerah. Rencana anggaran yang telah dibuat diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja dari pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Kinerja pemerintahan suatu daerah dapat diukur melalui kinerja keuangan. Menurut Mardiasmo (2018) dilakukannya pengukuran kinerja untuk membantu pemerintah dalam perbaikan kinerja, membantu pemerintah dalam pengalokasian sumber daya, membantu dalam membuat keputusan yang baik, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta dapat memperbaiki komunikasi antar kelembagaan. Kinerja yang sesuai dengan yang direncanakan akan menghasilkan pencapaian yang baik. Jika kinerja bisa melebihi dari yang direncanakan maka menghasilkan pencapaian sangat baik. Namun, jika kinerja dijalankan tidak berjalan sesuai rencana atau tidak mencapai target maka kinerja akan dianggap buruk.

Pengukuran kinerja keuangan penting untuk suatu daerah dalam menilai sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tanggung jawab tersebut bukan hanya terkait dengan bagaimana keuangan yang digunakan publik telah digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga, perusahaan atau organisasi. Pengukuran kinerja keuangan dijadikan bahan evaluasi dalam perbaikan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan sistem dan implementasinya. Pengukuran kinerja keuangan juga dijadikan tolok ukur dalam peningkatan kinerja untuk periode berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan dapat diketahui melalui perhitungan rasio keuangan. Rasio yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada penelitian ini adalah rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasiaan belanja daerah. Penelitian ini juga didukung dengan Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis yang diperoleh melalui proses wawancara dan melakukan literasi pada dokumen daerah untuk mendapatkan informasi terkait dengan daerah tersebut.

Kabupaten Manggarai Timur adalah wilayah pemekaran dari Kabupaten Manggarai pada tahun 2007 dan terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemekaran yang terjadi menjadikan Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah dan memiliki kewenangan serta kewajiban dalam mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengatur pemerintah yang efektif, efisien dan mandiri. Berhasilnya suatu pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah tentu tentu tidak terlepas dari bagaimana kemampuan daerah tersebut dalam mengatur keuangan daerah. Sebagai suatu daerah yang diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahan dalam menjalankan

pembangunan dalam daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur juga harus mampu dalam melapor pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari Pelaporan keuangan tersebut akan dinilai apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur sudah mampu menjalankan penyelenggaraan dengan baik atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun anggaran 2017-2021 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun anggaran 2017-2021 berdasarkan pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan.

1.4 Kontribusi Penelitian

1) Untuk Penulis

Penelitian ini dijadikan dasar pembelajaran untuk penulis serta menambah wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio keuangan.

2) Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bacaan dari mahasiswa akuntansi yang berada di Universitas Kristen Duta Wacana, serta dapat menambah wawasan serta ilmu yang bisa diterapkan untuk proses pembelajaran.

3) Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Penelitian diharapkan agar bisa dijadikan acuan maupun bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan ataupun dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan ataupun menghasilkan pendapatan daerah.

4) Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang digunakan dalam melakukan penelitian yang serupa, dapat menambah informasi serta wawasan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk satu daerah saja yaitu Kabupaten Manggarai Timur
- 2) Untuk mengetahui hasil penelitian digunakan pengukuran rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektivitas,

rasio efisiensi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

- 3) Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima tahun yaitu tahun 2017-2021.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1) Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai Timur jika dilihat dari perolehan PAD menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh sangat rendah sehingga berdampak pada tiga rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian dan rasio ketergantungan. Tingkat kemandirian dan derajat desentralisasi dapat dikatakan sangat rendah karena kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah sangat rendah dan pendapatan transfer yang diperoleh sangat tinggi. Hal ini juga menyebabkan Kabupaten Manggarai Timur masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dalam membiayai segala kegiatan dan urusan daerah.
- 2) Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai Timur jika dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur dapat dikatakan kurang efektif dan telah efisien. Kabupaten manggarai timur dianggap kurang efektif karena belum mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Kabupaten Manggarai timur dapat dikatakan efisien karena mampu merealisasikan belanja yang dikeluarkan sesuai dengan pendapatan daerah bahkan kurang dari pendapatan daerah.
- 3) Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai timur jika dilihat dari rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan pada Kabupaten Manggarai Timur

berada pada kategori rendah. Tingkat pertumbuhan tidak mengalami peningkatan yang tinggi bahkan terdapat tahun-tahun tertentu yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- 4) Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai Timur jika dilihat dari rasio keserasian menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja operasi lebih besar dari pengeluaran anggaran belanja modal.

5.2 Rekomendasi

a. Untuk pemerintah Kabupaten Manggarai Timur:

- 1) Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur harus mampu dalam meningkatkan SDM yang ada pada daerah dapat dilakukan dengan adanya pelatihan serta kualitas pendidikan yang baik.
- 2) Pemerintah dapat meningkatkan promosi terkait dengan potensi yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, hal ini dapat mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Manggarai Timur.
- 3) Pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur karena ketersediaan Infrastruktur menjadi masalah yang dapat berdampak pada sektor yang lain. Jika ketersediaan infrastruktur menunjang maka masyarakat luar atau masyarakat lokal dapat lebih mudah menjalani segala kegiatan dalam peningkatan pendapatan.
- 4) Pemerintah harus mengoptimalkan pemungutan pajak agar pembayaran pajak dapat sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran.

b. Untuk penelitian selanjutnya

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa melanjutkan penelitian ini dengan memperpanjang periode waktu penelitian
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian. Seperti dengan menambah jumlah Kabupaten yang diteliti, tidak hanya satu saja. Sehingga dapat melakukan perbandingan antara penelitian di wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyantoko, H. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi (Online)*(<https://repository.usd.ac.id>)
- Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016–2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1113-1132.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Cahyadi, M. I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Fatimah, F. N. A. D. (2016). *Teknik analisis SWOT*. Anak Hebat Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2020). *Grand Theory Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Semarang: Yoga Pratama
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 116-130.
- Halim, Abdul. (2014) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan. Selemba Empat
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25-35.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Raharjo, Eko. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).
- Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147-153.
- Siregar, Baldrich. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Solihat, I. (2020). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Dengan Menggunakan Metode Rasio Keuangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 244-255.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sanyoto, Tagiyo. (2022) Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-2021. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Pembangunan Nasional Veteran
- Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).

